

HISTORIOGRAFI PERS INDONESIA: TINJAUAN KRITIS ATAS PERSPEKTIF KOLONIAL, VERNAKULAR, DAN PASCAKEMERDEKAAN

Febbrizal¹

¹ S3 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

*1E-mail Korespondensi: febbrizal@ui.ac.id

Received: 13-05-2026 | Revised: 22-05-2026 | Accepted: 23-05-2026

Abstrak

Kajian ini bertujuan menganalisis secara kritis tiga karya historiografi utama tentang pers Indonesia, yakni Ahmat Adam (2003), David T. Hill (2011), dan Basilius Triharyanto (2009). Dengan menggunakan pendekatan Historiographical Review dan Qualitative Comparative Analysis, artikel ini menelaah bagaimana ketiga karya tersebut mengonstruksi narasi sejarah pers Indonesia dari era kolonial hingga pascakemerdekaan. Temuan menunjukkan bahwa ketiga karya mewakili tiga lokus analitis yang berbeda: pers sebagai agen modernisasi dan pemicu kesadaran nasional (Adam), jurnalisme sebagai bentuk oposisi politik (Hill), serta pers vernakular sebagai wahana antikolonialisme di luar Pulau Jawa (Triharyanto). Sintesis komparatif mengungkap bahwa historiografi pers Indonesia masih terfragmentasi secara geografis dan temporal, dengan kesenjangan yang signifikan pada kajian pers pasca-Reformasi, perspektif gender, dan kawasan Indonesia Timur. Sebagai kontribusi orisinal, artikel ini menawarkan kerangka kerja "tiga simpul"—modernisasi, oposisi, dan lokalitas—sebagai landasan tematik terpadu bagi penelitian sejarah pers Indonesia ke depan.

Kata kunci: historiografi pers, Indonesia, kolonialisme, nasionalisme, jurnalisme.

This study aims to analyze three major historiographical works on the Indonesian press critically: Ahmat Adam (2003), David T. Hill (2011), and Basilius Triharyanto (2009). Employing a Historiographical Review approach and Qualitative Comparative Analysis, this article examines how these three works construct the narrative of the Indonesian press from the colonial era to the post-independence period. The findings indicate that these works represent three distinct analytical loci: the press as an agent of modernization and a catalyst for national consciousness (Adam), journalism as a form of political opposition (Hill), and the vernacular press as a vehicle for anti-colonialism beyond Java (Triharyanto). A comparative synthesis reveals that the historiography of the Indonesian press remains geographically and temporally fragmented, with significant gaps in studies focusing on the post-Reformasi press, gender perspectives, and the eastern regions of Indonesia. As an original contribution, this article proposes a "three nodes" framework—modernization, opposition, and locality—as a unified thematic foundation for future research on the history of the Indonesian press.

Keywords: *press historiography, Indonesia, colonialism, nationalism, journalism.*

1. Pendahuluan

Perkembangan kajian sejarah pers di Asia Tenggara—dan Indonesia khususnya—telah mengalami transformasi yang cukup signifikan sejak dekade 1990-an. Seiring tumbuhnya perhatian akademik terhadap peran media dalam proses *nation-building*, berbagai karya historiografi mulai bermunculan dan berusaha memetakan dinamika pers dari era kolonial hingga era kontemporer. Media di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional, terutama melalui konstruksi tubuh manusia sebagai simbol identitas kolektif. Diskursus ini dipengaruhi oleh budaya Jawa tradisional, kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan semangat kemerdekaan. Media mencerminkan ketegangan antara nasionalisme kolektif dan modernisme individualis, yang terus berlanjut hingga krisis persatuan nasional pada 1960-an (Utomo, 2020). Dalam konteks historiografi, diskursus *nation-building* di Indonesia dibagi menjadi empat periode, yang meliputi era kolonial, masa Sukarno, Orde Baru, dan era pasca-reformasi. Media berperan dalam membangun narasi anti-kolonial, identitas nasional, dan diskursus desentralisasi di era demokrasi (Nugroho, 2020). Namun demikian, sebagian besar literatur yang ada masih bersifat terfragmentasi, yakni meliputi sebagian yang hanya terfokus pada periode kolonial, sebagian yang lain membatasi cakupan geografisnya di Pulau Jawa, dan ada pula yang lebih condong ke ranah biografi tokoh ketimbang analisis struktural pers itu sendiri. Akibatnya, pemahaman kita tentang pers Indonesia sebagai satu kesatuan historis yang kompleks masih jauh dari komprehensif.

Urgensi pembacaan ulang atas sejarah pers Indonesia semakin mendesak ketika dihadapkan pada gelombang disrupsi digital yang kini melanda industri media global. Transformasi dari pers cetak ke platform digital bukan sekadar pergeseran medium—ia mengubah secara mendasar cara produksi, distribusi, dan konsumsi informasi, yang pada gilirannya memengaruhi ekosistem demokrasi dan kebebasan pers (Anggono et al., 2025; Darmanto et al., 2025; Rohayati & Abdillah, 2024). Memahami bagaimana pers Indonesia mengonstruksi identitas, kekuasaan, dan oposisi dalam berbagai periode historis bukan lagi sekadar latihan akademik—melainkan prasyarat untuk memetakan tantangan pers kontemporer secara lebih jernih dan berbasis bukti (Dewi et al., 2026). Kajian sejarah pers cetak memberikan pijakan historis yang diperlukan untuk membaca fenomena fragmentasi media digital saat ini dengan lebih substantif.

Di antara karya-karya yang paling signifikan dalam tradisi historiografi pers Indonesia, terdapat tiga karya yang menjadi fokus tinjauan ini. Pertama, Ahmat Adam (2003) menghadirkan studi komprehensif tentang kebangkitan pers vernakular dan tumbuhnya kesadaran ke-Indonesiaan di era kolonial (1855–1913). Kedua, David T. Hill (2011) menyajikan biografi kritis Mochtar Lubis—salah satu tokoh jurnalisme paling kontroversial dalam sejarah Indonesia—sebagai lensa untuk memahami dinamika pers pascakemerdekaan. Ketiga, Basilius Triharyanto (2009) menelusuri dinamika surat kabar *Pertja Selatan* sebagai representasi antikolonialisme di Sumatera Selatan. Ketiga karya ini dipilih karena secara bersama-sama merepresentasikan tiga dimensi kritis dalam historiografi pers Indonesia: dimensi temporal (kolonial hingga Orde Baru), dimensi geografis (Jawa dan luar Jawa), serta dimensi metodologis (kronologis-tematik, biografi kritis, dan analisis wacana). Meski begitu, belum ada kajian yang secara sistematis menyintesis ketiganya dalam satu kerangka analitis komprehensif sekaligus mengidentifikasi celah naratif yang masih tersisa—dan itulah ruang yang hendak diisi artikel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan penelitian berikut; pertama, bagaimana pendekatan metodologis dan teoretis dikonstruksi dalam historiografi pers Indonesia lintas era pada tiga karya utama tersebut?; Kedua, apa kesenjangan

naratif yang masih tersisa dalam literatur sejarah pers Indonesia, dan ke mana arah penelitian masa depan yang relevan?

2. Metodologi

Artikel ini menggunakan pendekatan *historiographical review* yang dikombinasikan dengan *qualitative comparative analysis*. Pendekatan *historiographical review* diterapkan untuk mengidentifikasi bagaimana setiap karya mengonstruksi narasi sejarahnya—termasuk kerangka teoretis yang digunakan, sumber yang diacu, serta perspektif yang dipilih atau luput dari perhatian pengarang (de Toro Muñoz, 2018; Zhizhong, 2006). Sementara itu, *qualitative comparative analysis* digunakan untuk memetakan persamaan, perbedaan, dan ketegangan analitis di antara ketiga karya secara sistematis, sehingga menghasilkan sintesis yang lebih kaya daripada sekadar deskripsi per karya (Barros et al., 2019).

Kriteria inklusi dalam pemilihan ketiga karya didasarkan pada empat pertimbangan. Pertama, relevansi tematik yang langsung berkaitan dengan sejarah pers Indonesia. Kedua, representativitas periodisasi, di mana masing-masing karya mewakili era dan perspektif historiografis yang berbeda dan saling melengkapi. Ketiga, pengakuan akademik yang telah diperoleh karya-karya tersebut dalam komunitas kajian Indonesia dan Asia Tenggara. Keempat, ketersediaan edisi berbahasa Indonesia yang memadai untuk keperluan analisis tekstual mendalam. Karya Adam (2003) dipilih sebagai studi paling komprehensif tentang pers awal dan nasionalisme; Hill (2011) dipilih karena menghadirkan perspektif biografi kritis yang menempatkan jurnalis sebagai aktor historis utama; Triharyanto (2009) dipilih karena membawa perspektif pers luar Jawa yang selama ini kerap diabaikan dalam wacana historiografi dominan.

Data dikumpulkan melalui pembacaan mendalam (*close reading*) terhadap masing-masing teks dengan memperhatikan empat aspek: argumen utama yang dibangun pengarang, metodologi yang diterapkan, sumber primer yang diacu, serta posisi masing-masing karya dalam lanskap historiografi pers Indonesia yang lebih luas. Hasil pembacaan kemudian dikompilasi dalam matriks komparatif yang menjadi dasar analisis tematik dan sintesis lintas karya.

3. Hasil

3.1. Pers sebagai Agen Modernisasi dan Kebangkitan Kesadaran Nasional

Salah satu tema yang paling konsisten muncul dalam historiografi pers Indonesia adalah relasi antara perkembangan pers dan proses modernisasi sosial. Ahmat Adam (2003) membangun argumen bahwa pers di Hindia Belanda bukan semata fenomena komunikasi, melainkan produk sampingan dari transformasi sosial-ekonomi yang dipicu oleh Politik Liberal dan kemudian dipercepat oleh Politik Etis. Adam menguraikan bagaimana mesin cetak yang pada mulanya digunakan pemerintah kolonial untuk keperluan administratif—dan oleh para misionaris untuk keperluan penginjilan—secara bertahap berubah menjadi instrumen intelektual kaum pribumi yang lapar akan modernitas.

Momen-momen kritis yang dipetakan Adam—yakni tahun 1855, 1870, 1884, 1901, 1906, 1911, dan 1913—menunjukkan bahwa perkembangan pers tidak berlangsung secara linier, melainkan merespons kondisi ekonomi-politik yang dinamis. Kemunculan *Bromartani* dan *Poespitamantjawarna* pada 1855 menandai hadirnya pers yang berorientasi pada pencerahan dan pendidikan. Guncangan industri gula pada 1884 mendorong peralihan kepemilikan pers dari

tangan Eropa ke tangan Tionghoa-peranakan, yang kemudian menjadikan pers tidak hanya sebagai alat bisnis tetapi juga wahana persatuan komunal. Puncaknya, pada periode 1906–1913, tokoh-tokoh seperti R.M. Tirta Adhi Soerjo dan H. Samanhoedi mengonsolidasi pers pribumi sebagai instrumen kesadaran nasional, menandai momen ketika pers bertransformasi dari medium komunikasi menjadi motor penggerak gerakan kebangsaan.

Triharyanto (2009), meskipun berada dalam konteks geografis yang berbeda, secara implisit mendukung tesis Adam tentang keterkaitan erat antara pers dan modernisasi. *Pertja Selatan* lahir dan berkembang di Palembang justru karena kondisi ekonomi yang relatif makmur—karet menjadi katalis bagi tumbuhnya kelas pembaca yang secara finansial mampu berlangganan surat kabar, sementara sekolah-sekolah yang berkembang di Sumatera Selatan menyediakan basis literasi yang memadai. Dengan demikian, baik di Jawa maupun di Sumatera Selatan, pers tidak tumbuh di ruang hampa, melainkan di tengah lanskap ekonomi dan pendidikan yang sedang berubah—sebuah pola yang konsisten dan signifikan.

3.2. Jurnalisme sebagai Oposisi Politik: Biografi sebagai Metode Historiografi

Tema kedua yang menonjol dalam ketiga karya ini adalah posisi jurnalisme sebagai bentuk oposisi terhadap kekuasaan. David T. Hill (2011) menjadikan kehidupan Mochtar Lubis sebagai lensa untuk membaca dinamika pers Indonesia di era pasca-proklamasi. Mengadopsi konsep "subjek rentan" dari Thomas Couser, Hill berupaya menempatkan Mochtar bukan sebagai pahlawan tak bercela, melainkan sebagai manusia yang pilihan-pilihan politiknya dibentuk sekaligus membentuk konteks zamannya. Pendekatan ini menghasilkan potret historiografis yang lebih jujur dan bernuansa ketimbang biografi heroik konvensional.

Yang membuat kajian Hill bernilai secara historiografis adalah kemampuannya menunjukkan bahwa oposisi Mochtar Lubis bersifat konsisten secara prinsip, namun tidak selalu koheren secara ideologis. Mochtar menentang Sukarno dengan keras, kemudian mendukung terbentuknya Orde Baru, lalu berbalik mengkritik Orde Baru setelah menyaksikan korupsi sistemik yang mencengkeram rezim Soeharto. Konsistensi Mochtar bukan terletak pada afiliasi politiknya, melainkan pada moralisme jurnalistik yang ia pegang teguh—sebuah posisi yang, sebagaimana dianalisis Hill, mencerminkan tradisi modernisme sekuler dalam jurnalisme Indonesia. Tradisi ini menempatkan pers sebagai penjaga moral publik, bukan sekadar perekam peristiwa.

Pilihan Hill menggunakan metode biografi kritis yang membedakan karyanya secara metodologis dari Adam dan Triharyanto. Jika Adam menggunakan analisis kronologis-tematik berbasis sumber kolonial dan Triharyanto menerapkan analisis wacana Fairclough, Hill menempatkan individu sebagai unit analisis utama. Pendekatan ini memiliki kekuatan tersendiri dalam mengungkap tensi antara pilihan personal dan struktur sosial, sekaligus memperlihatkan sisi manusiawi dari sejarah pers yang sering kali terpinggirkan dalam narasi institusional. Namun, keterbatasannya juga nyata: fokus pada satu individu, sebesar apa pun pengaruhnya, niscaya menyisakan ruang yang tidak terjamah dalam gambar keseluruhan.

3.3. Desentralisasi Narasi: Pers Vernakular di Luar Jawa

Tema ketiga yang layak dicatat adalah upaya desentralisasi narasi dalam historiografi pers Indonesia. Baik Adam maupun Triharyanto menaruh perhatian pada pers di luar Jawa, meskipun dengan bobot dan kedalaman yang berbeda. Adam secara jujur mengakui keterbatasan kajiannya dalam merepresentasikan pers vernakular di luar Jawa secara komprehensif—sebagian karena arsip kolonial yang tersedia di luar Jawa tidak sebaik yang ada di Jawa. Triharyanto, sebaliknya, secara spesifik mengisi celah tersebut melalui studi mendalam tentang *Pertja Selatan*.

Kontribusi Triharyanto dalam konteks desentralisasi narasi ini cukup signifikan. Dengan menerapkan analisis wacana kritis Fairclough, Triharyanto menunjukkan bahwa *Pertja Selatan* bukan sekadar surat kabar daerah yang mengikuti arus nasional dari pusat, melainkan arena wacana yang aktif membentuk identitas lokal dan regional dalam relasi tegangan dengan kekuasaan kolonial. Interaksinya yang organik dengan organisasi pergerakan lokal, pengaruh ekonomi karet terhadap pertumbuhan basis pembaca, serta sikap antikolonialnya yang konsisten menjadikan *Pertja Selatan* sebagai kasus yang menarik untuk memahami pluralitas historis pers Indonesia yang sering diabaikan oleh narasi nasional dominan.

Namun demikian, upaya desentralisasi narasi ini belum sepenuhnya tuntas. Ketiga karya—termasuk Adam dan Triharyanto—belum menjangkau secara memadai kawasan Indonesia Timur, pers berbasis komunitas agama di luar Islam, maupun pers etnis non-Jawa dan non-Melayu yang juga memainkan peran penting dalam pembentukan kesadaran regional. Dengan kata lain, "pinggiran" dalam historiografi pers Indonesia masih sangat luas dan menunggu untuk dinarasikan.

3.4. Pergeseran Metodologis dalam Historiografi Pers Indonesia

Perbandingan ketiga karya juga mengungkap pergeseran metodologis yang signifikan dalam cara para sejarawan mendekati pers sebagai objek kajian. Adam menggunakan kronologi tematik berbasis sumber kolonial, arsip surat kabar asli, dan literatur sekunder berbahasa Belanda yang kaya. Hill mengadopsi biografi kritis dengan pendekatan humanistik yang secara sadar menempatkan reflektivitas pengarang sebagai bagian integral dari proses penelitian—bukan sebagai kelemahan yang perlu disembunyikan, melainkan sebagai transparansi yang justru memperkuat integritas kajian. Triharyanto menggabungkan metode sejarah konvensional dengan analisis wacana kritis yang berakar pada disiplin ilmu komunikasi.

Pergeseran metodologis ini bukan sekadar variasi teknis—ia mencerminkan evolusi epistemologis dalam kajian sejarah pers Indonesia yang berlangsung secara bertahap. Dari sejarah yang berpusat pada institusi (pers sebagai lembaga formal), bergerak menuju sejarah yang berpusat pada agensi (individu dan komunitas sebagai pelaku sejarah), dan selanjutnya menuju sejarah yang berpusat pada wacana (teks, makna, dan relasi kuasa sebagai objek analisis). Ketiga pendekatan ini bukan saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam membangun pemahaman yang lebih holistik tentang sejarah pers Indonesia.

4. Diskusi

4.1. Analisis Komparatif: Persetujuan, Ketegangan, dan Kesenjangan

Tabel 1 menyajikan perbandingan sistematis ketiga karya berdasarkan empat parameter utama: lokus geografis, periode temporal, pendekatan teoretis, dan keterbatasan utama masing-masing. Matriks ini memudahkan identifikasi pola kesesuaian dan ketegangan analitis yang mungkin tidak tampak jika karya-karya tersebut ditelaah secara terpisah.

Tabel 1. Perbandingan Tiga Karya Historiografi Pers Indonesia

Parameter	Ahmat Adam (2003)	David T. Hill (2011)	Basilius Triharyanto (2009)
Lokus Geografis	Jawa-sentris (dengan sebagian luar Jawa)	Nasional (berpusat di Jakarta)	Sumatera Selatan (Palembang)

Periode Temporal	1855–1913	1922–2004	1926 – awal Perang Dunia II
Pendekatan Teoretis	Kronologis-tematik; ekonomi-politik; sumber kolonial dan pers asli	Biografi kritis (Thomas Couser); modernisme sekuler; refleksivitas penulis	Analisis wacana kritis Fairclough; sejarah sosial; kombinasi metode sejarah dan komunikasi
Keterbatasan Utama	Kurang komprehensif di luar Jawa; cakupan waktu berhenti di 1913	Ketegangan subjektif antara penulis biografi dan subjek; fokus pada satu tokoh	Kedalaman analisis terbatas; kajian berasal dari skripsi sarjana; hanya satu surat kabar

Sumber: Sintesis pembacaan karya Adam (2003), Hill (2011), dan Triharyanto (2009) dari (Febbrizal & Abdurakhman, 2023)

Berdasarkan analisis komparatif, setidaknya tiga titik persetujuan dapat diidentifikasi lintas ketiga karya. Pertama, ketiganya sepakat bahwa pers tidak pernah berdiri sebagai entitas yang sepenuhnya otonom—pers selalu beroperasi dalam relasi kuasa yang melibatkan negara, modal, dan berbagai kekuatan sosial yang saling bersinggungan. Kedua, ketiganya mengakui bahwa kondisi ekonomi lokal—kemakmuran relatif, tumbuhnya kelas menengah, dan tersedianya pasar pembaca yang literat—merupakan prasyarat bagi tumbuh dan bertahannya pers yang mandiri. Ketiga, ketiganya menempatkan pers sebagai instrumen pembentukan identitas: baik identitas nasional (Adam), identitas kelas intelektual (Hill), maupun identitas regional (Triharyanto).

Di sisi lain, ketegangan analitis yang paling jelas terlihat adalah pada soal sentralisasi versus desentralisasi narasi. Adam dan Hill, meskipun dengan fokus yang berbeda, secara implisit masih menempatkan Jawa—dan lebih spesifik lagi, elit nasional berbasis di Jakarta—sebagai epicentrum sejarah pers Indonesia. Triharyanto secara sadar berupaya melawan arus ini, namun kajiannya masih terbatas pada satu surat kabar dan satu wilayah. Ketegangan ini menunjukkan bahwa agenda desentralisasi naratif dalam historiografi pers Indonesia masih merupakan proyek yang belum selesai dan memerlukan perhatian lebih serius dari komunitas akademik.

4.2. Keterbatasan Kolektif dan Implikasi Teoretis

Secara kolektif, ketiga karya ini meninggalkan sejumlah celah yang perlu dicatat. Pertama, tidak satu pun karya yang secara eksplisit menganalisis pers Indonesia dari perspektif gender—padahal catatan sejarah menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran aktif dalam pers pergerakan, baik sebagai penulis, penyunting, maupun penggagas. Kedua, ketiga karya berhenti sebelum memasuki era Reformasi (pasca-1998), yang merupakan periode transformasi pers paling dramatis dalam sejarah Indonesia modern—ditandai oleh ledakan kebebasan pers, proliferasi media baru, dan kemudian disrupsi digital. Ketiga, kajian tentang pers berbasis komunitas dan pers etnis—khususnya di kawasan Indonesia Timur—masih sangat terbatas dalam lanskap historiografi yang ada.

Implikasi teoretisnya cukup substansial, yakni historiografi pers Indonesia memerlukan suatu kerangka analitis yang mampu menjembatani perspektif makro (struktur ekonomi-politik yang membentuk pers) dan perspektif mikro (agensi individu dan komunitas dalam merespons dan membentuk struktur tersebut), sekaligus melampaui batas-batas geografis dan temporal yang

selama ini membatasi cakupannya. Tanpa kerangka semacam itu, studi-studi yang ada—sekomprehensif apa pun secara individual—akan terus menghasilkan gambaran yang parsial tentang sejarah pers Indonesia.

5. Kesimpulan

Kajian ini telah menunjukkan bahwa tiga karya historiografi pers Indonesia yang ditelaah—Adam (2003), Hill (2011), dan Triharyanto (2009)—masing-masing memberikan kontribusi yang signifikan, namun tidak dapat dipahami secara memadai apabila dibaca secara terpisah. Adam menyediakan fondasi teoretis yang kokoh tentang relasi pers dan modernisasi, menunjukkan bahwa tumbuhnya kesadaran nasional tidak mungkin dilepaskan dari hadirnya pers vernakular. Hill menawarkan dimensi personal dan politik yang kerap absen dalam kajian institusional, memperlihatkan bagaimana seorang jurnalis dapat menjadi agen sejarah sekaligus produk dari zamannya. Triharyanto menghadirkan perspektif pinggiran yang memperkaya dan mengimbangi narasi Jawa-sentris, mengingatkan kita bahwa sejarah pers Indonesia sesungguhnya adalah sejarah banyak suara dari banyak tempat.

Sintesis komparatif atas ketiga karya ini menghasilkan sebuah kerangka kerja tematik terpadu yang dapat disebut sebagai model "tiga simpul", yakni modernisasi dan kesadaran—sebagaimana dinarasikan oleh Adam—yang menunjukkan bagaimana pers menjadi wahana transformasi intelektual dan sosial; oposisi dan moralisme—sebagaimana dicontohkan oleh Mochtar Lubis dalam kajian Hill—yang memperlihatkan pers sebagai benteng perlawanan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang; dan lokalitas dan resistensi—sebagaimana digambarkan oleh Triharyanto—yang menunjukkan bahwa perlawanan antikolonial tidak selalu bertumpu di pusat, melainkan juga berkobar di pinggiran. Ketiga simpul ini bukan entitas yang terpisah, melainkan saling terkait dan saling mengandaikan dalam membentuk wajah historis pers Indonesia yang kompleks dan penuh lapisan.

Berdasarkan sintesis ini, setidaknya empat rekomendasi konkret dapat diajukan untuk penelitian masa depan. Pertama, sangat diperlukan kajian yang mengisi kesenjangan era Reformasi dan pasca-Reformasi (1998–sekarang) yang belum terkaver secara memadai dalam literatur yang ada—termasuk transformasi pers cetak ke platform digital dan implikasinya bagi kebebasan pers. Kedua, perspektif gender perlu dikembangkan secara eksplisit dalam historiografi pers Indonesia, dengan meneliti peran dan kontribusi jurnalis-jurnalis perempuan yang selama ini tersisih dari narasi utama. Ketiga, cakupan geografis perlu diperluas ke kawasan Indonesia Timur dan komunitas pers berbasis etnis non-dominan yang belum mendapat perhatian memadai. Keempat, kajian interdisipliner yang menggabungkan sejarah, ilmu komunikasi, dan kajian budaya perlu lebih aktif dikembangkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang pers Indonesia lintas zaman.

Dalam konteks disrupsi digital yang terus berlangsung dan mengubah lanskap media secara fundamental, memahami sejarah pers Indonesia secara holistik bukan sekadar tugas akademik yang berdiri sendiri—melainkan fondasi yang diperlukan untuk membangun ekosistem media yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan ke depannya. Masa lalu pers Indonesia, dengan segala kompleksitas dan kontradiksinya, adalah cermin yang tidak boleh kita abaikan.

Referensi

Anggono, B. D., Wahanisa, R., Sari A.P, A. O. V. P., & Adiyatma, S. E. (2025). Interrogating the Legal Foundations of Digital Transformation: Balancing

- Economic Growth and Social Welfare in the Era of Disruption. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 191–211. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12211>
- Barros, A., Carneiro, A. D. T., & Wanderley, S. (2019). Organizational archives and historical narratives: Practicing reflexivity in (re)constructing the past from memories and silences. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 14(3), 280–294. <https://doi.org/10.1108/QROM-01-2018-1604>
- Darmanto, N., Ronda, A. M., & Widowati, D. (2025). Transformation of the Indonesian Book Publishing Industry from Traditional to Digital. *Journal of Information and Communication Convergence Engineering*, 23(3), 168–181. <https://doi.org/10.56977/jicce.2025.23.3.168>
- de Toro Muñoz, F. M. (2018). Nazismo Y Antifascismo En Los Debates Historiográficos De La República Democrática Alemana, 1945-1990. *Historia Social*, (92), 139–156.
- Dewi, S. I., Artaria, M. D., Wahyudi, I., & Ostaszewska, A. (2026). Voicing the body: Postcolonial feminist praxis and narratives of body autonomy in Indonesian women's podcasts. *Women's Studies International Forum*, 117, 103331. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2026.103331>
- Febbrizal, F., & Abdurakhman, A. (2023). Press History Framework for A Press History Course. *Proceedings International Conference on Education Innovation and Social Science*, 331–337.
- Nugroho, S. (2020). Nationalism and the Making of Indonesian Subjects. In S. Nugroho, *The Divergent Nation of Indonesia* (Vol. 9, pp. 19–47). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4242-8_2
- Rohayati, Y., & Abdillah, A. (2024). Digital Transformation for Era Society 5.0 and Resilience: Urgent Issues from Indonesia. *Societies*, 14(12), 266. <https://doi.org/10.3390/soc14120266>
- Utomo, M. R. al Q. S. (2020). Geopolitical Bodies: Media Discourse on the Indonesian National Identity. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(1). <http://ejournal.ukm.my/mjc/article/view/38598>
- Zhizhong, Q. (2006). The Study of Chinese Historiography from the Perspective of Intellectual History. *Frontiers of History in China*, 1(1), 84–96. <https://doi.org/10.1007/s11462-005-0007-4>